



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Komunikasi Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Daerah Wisata di Kabupaten Magelang

Suwastika Anggraeni<sup>1</sup>, muhammad eko atmojo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, [anggra424@gmail.com](mailto:anggra424@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, [muhammadekoatmojo@fisipol.umy.ac.id](mailto:muhammadekoatmojo@fisipol.umy.ac.id)

Corresponding Author: [anggra424@gmail.com](mailto:anggra424@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Communication has two different meanings, namely communication in a broad and narrow sense. Communication in a broad sense is the activity of exchanging messages that occurs reciprocally in the development process, especially communication between society and government. Communication in the narrow sense is an effort to convey messages in development to the communities involved. Apart from that, the government makes various efforts to communicate with the public. One of them is by conveying policies that have been set by the government and implementing them to the community. Various strategies are being sought by the government for the community in implementing government policies in implementing regional development in Magelang Regency. In implementing regional development programs there are several inhibiting factors. Apart from that, regional governments have the aim of implementing regional development to improve the economy in the area. This is an effort by the regional government to improve the welfare of the community. Apart from that, the tourism industry is currently one of the largest foreign exchange contributors for Indonesia, apart from the oil and gas industry, Indonesia is an agricultural country with abundant natural resources that can be utilized for tourism.*

**Keyword:** *regional development, communication, implementation.*

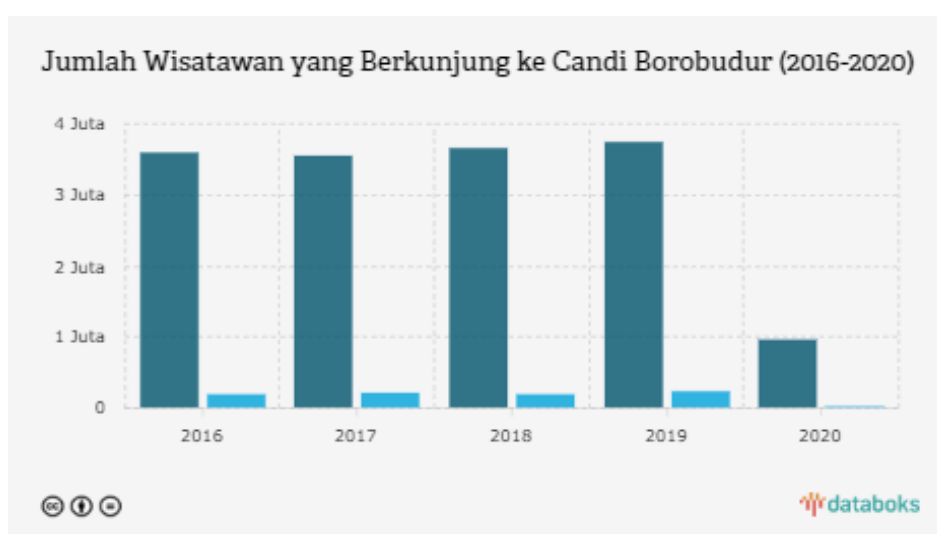
**Abstrak:** Komunikasi memiliki dua arti yang berbeda yaitu komunikasi dalam artian luas dan sempit. Komunikasi dalam arti luas adalah aktivitas pertukaran pesan yang terjadi secara timbal balik dalam proses pembangunan terutama komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi dalam artian sempit adalah upaya penyampaian pesan dalam pembangunan kepada masyarakat yang terlibat. Selain itu pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat. Salah satu nya, dengan penyampaian kebijakan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan di implementasikan kepada masyarakat. Berbagai strategi yang di upayakan pemerintah untuk masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan – kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang. Dalam melaksanakan program pembangunan daerah terdapat beberapa faktor

penghambat. Selain itu, pemerintah daerah memiliki tujuan dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat. Selain itu, Industri pariwisata saat ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, selain industri minyak dan gas Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata

**Kata Kunci:** Pembangunan Daerah, Komunikasi, Implementasi.

## PENDAHULUAN

Komunikasi memiliki arti yang luas dan sempit. Komunikasi dalam arti luas adalah aktivitas pertukaran pesan yang terjadi secara timbal balik dalam proses pembangunan terutama komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi dalam artian sempit adalah upaya penyampaian pesan dalam pembangunan kepada masyarakat yang terlibat (Istiyanto 2011). Komunikasi adalah awal dari keberhasilan dalam pembangunan proyek dalam desa wisata. Komunikasi pemerintah daerah sampai dengan pusat meliputi beberapa aspek yaitu aspek koordinasi, aspek komunikasi, aspek pendelegasian wewenang. Setiap aspek dalam komunikasi pemerintah memiliki fungsi masing-masing (Dunan, 2020). Hal ini setiap kebijakan dalam pembangunan perlu adanya komunikasi lebih lanjut ke masyarakat dengan jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya komunikasi tidak terencana dan mengakibatkan kepanikan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sulistiyowati 2021). Di Kabupaten Magelang terdapat wisata candi Borobudur, wisata religi dengan pusat ibadahnya agama budha yang ada di seluruh dunia dan merupakan budaya warisan dunia. Saat ini permasalahan yang terjadi pengunjung atau wisatawan yang datang melakukan aksi yang tak senonoh. Seperti hal nya, melakukan aksi vandalisme, stupa di coret menggunakan cat maupun pilok atau cat semprot, wisatawan membuang sampah sembarangan bahkan wisatawan tak segan naik ke stupa hanya demi melakukan foto dengan mendapatkan view terbaik. Berikut ini merupakan data terbaru yang di unggah di website. Wisatawan yang berkunjung ke candi Borobudur dari tahun 2016 sampai 2020. Jumlah pengunjung yang setiap tahun nya naik turun hingga di tahun 2020 ditemukan jumlah pengunjung ke candi Borobudur berjumlah 1 juta orang.



Sumber : databoks

Di satu sisi selain padatnya pengunjung untuk berwisata ke Candi Borobudur terdapat kerusakan- kerusakan selain terjadinya aksi vandalisme, buang sampah sembarangan, terdapat kerusakan karena abrasi dan erosi. Hal ini di akibatkan karena faktor cuaca dan alam

seperti hujan, angin, maupun paparan sinar matahari (Handaru and Safariningsih 2023).

Selain adanya permasalahan kerusakan candi karena ulah manusia dan faktor alam, terdapat pula permasalahan mengenai pengelolaan yang tidak bisa diatur dengan baik. Seperti yang tertuai dalam keputusan presiden no 1 tahun 1992 yang membahas bagaimana pengelolaan taman candi Borobudur dan Prambanan. Namun, penelitian ini lebih berfokus kepada pengelolaan candi Borobudur. Untuk melancarkan jalannya pengelolaan candi Borobudur ini diawali dengan sistem hukum. Menurut Friedman terdapat tiga sistem hukum yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substanci*), dan budaya (*legal culture*) (Hutabarat and Subiyanto 2024).

Permasalahan tidak cukup disitu namun terdapat masalah transaksi yang dimana menjadi bagian dari pengelolaan keuangan. Permasalahan yang dihadapi yakni dalam menggunakan mesin atau teknologi transaksi uang. Tantangan atau permasalahannya yang sering terjadi pada sistem pembayaran tiket masuk yaitu pengunjung terkendala dalam hal pembayaran layaknya *barcode* atau QRIS dan mesin EDC atau *electronic data capture* yang sering mengalami kendala error atau tidak bisa melakukan transaksi secara tiba-tiba atau tidak masuk ke sistem. Kendala ini yang menjadikan *m-banking* milik pengunjung berkurang menjadi dua kali lipat dan pengunjung harus mengurus ke bank hanya karena kendala eror (Mahendra 2023).

Permasalahan yang sedang trending saat ini yaitu mengenai harga tiket masuk yang semakin mahal, Dibawah ini merupakan data yang ditunjukkan oleh pengunjung ketika dilakukan survey mengenai harga tiket yang semakin mahal.

TARIF	Responden				
	Sangat murah	Murah	Cukup Mahal	Mahal	Sangat mahal
Tiket Masuk	0	15	33	6	0
Paket Sunrise	0	8	33	11	2
Safari gajah borobudur	0	5	36	12	1
Parkir kendaraan	0	15	33	6	0

Sumber : (Andina and Aliyah 2021)

Beberapa pengunjung merasa harga tiket masuk hingga tiket parkir kendaraan cukup mahal. Maka dari itu, permasalahan ini yang harus dibenahi oleh pengelola candi Borobudur agar wisata budaya ini bisa bertambah ramai (Andina and Aliyah 2021).

Pemerintah berupaya untuk mendukung dengan cara menyediakan fasilitas dalam memajukan pariwisata seperti yang diatur di dalam UU no 10 tahun 2009 perihal kepariwisataan. Dengan memanfaatkan akan adanya wisata budaya yaitu wisata candi Borobudur sendiri maka pemerintah berupaya mendukung program pengembangan wisata di sekitar candi seperti Balkondes atau balai ekonomi desa. Dengan adanya pengembangan wisata di sekitar candi diharapkan dapat menaikkan taraf perekonomian desa dan masyarakat dapat mengembangkan keahlian yang dimiliki misalnya membangun homestay di sekitar kawasan candi Borobudur (Hapsari and Rahayu 2018).

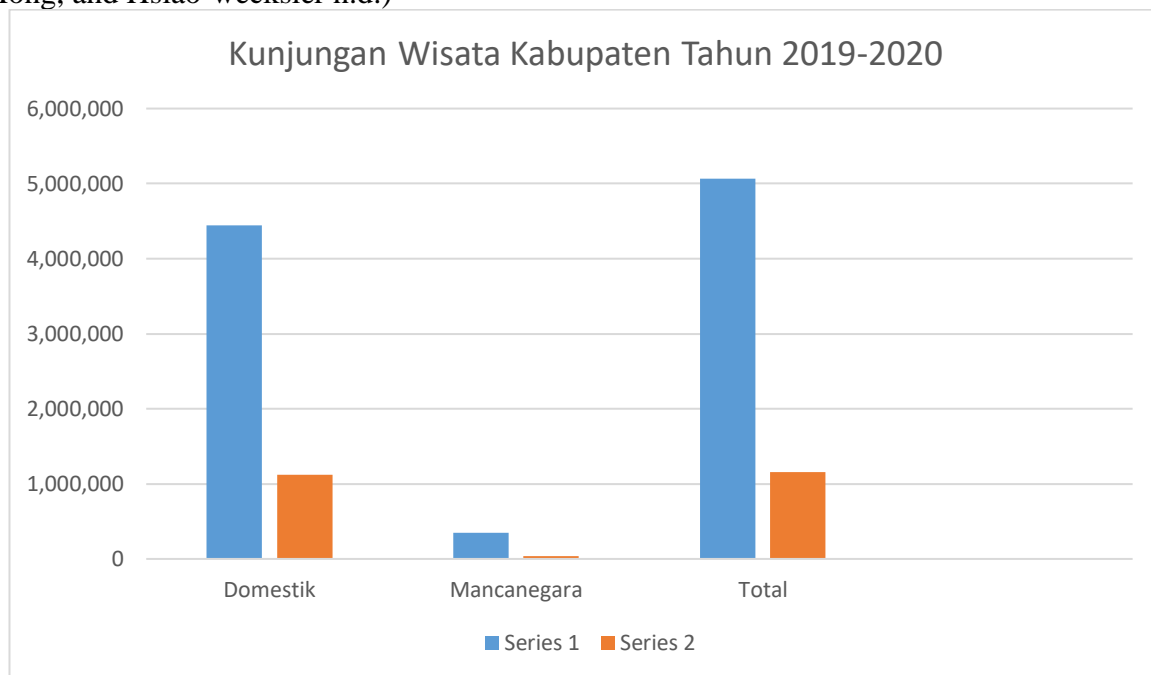
Upaya pemerintah dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat untuk kelancaran pembangunan proyek desa wisata hal ini sejalan dengan penyampaian kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan proyek ini. Pemerintah daerah ikut terlibat dalam komunikasi ini adalah camat, sebagai perangkat daerah camat sendiri memiliki tugas yang harus dijalankan. Camat berhak melakukan koordinasi kegiatan kepada masyarakat untuk mendorong keberlangsungan pembangunan proyek desa wisata. Selain itu, camat juga berhak atas menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat, dan camat bertanggung jawab atas pelaporan wewenang kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Mustanir, A.; Ramadhan, Muhammad Rohady.; Razak, Muhammad Rais Rahmat; Lukman; Tajuddin 2019). Perangkat desa atau camat yang melakukan komunikasi

pemerintahan dapat menyerap aspirasi public, mempercepat penyampaian informasi, disseminasi kebijakan. Kualitas dan kedalaman informasi lebih penting daripada jumlah dan keluasan media yang digunakan (Fadhil 2020).

Pemerintah bertanggung jawab atas segala hak dalam mengembangkan desa wisata ini. Maka dari itu, pemerintah harus menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat sekitar. Dan pemerintah dapat memberikan edukasi untuk kelancaran dalam mengembangkan daerah wisata. Adapun teori Harold D. Laswell yang menjelaskan memberikan gambaran atau penjelasan dalam kegiatan komunikasi yang baik adalah menjawab komunikasi. Teori tersebut mempunyai 4 unsur yaitu komunikator atau sumber, komunikasi atau khalayak, media, dan efek atau timbal balik(Syahputra and Sariwaty 2021).

Adanya komunikasi yang baik akan memiliki pengaruh yang bagus, sebaliknya jika pemerintah tidak melakukan komunikasi yg baik terhadap masyarakat maka masyarakat tidak bisa menerima dengan baik. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas dan seperti sarana dan prasarana agar masyarakat lebih nyaman ketika pembangunan proyek daerah wisata berlangsung(Nurul Khansa Fauziyah and Aini Mahara 2022).

Alasan pemerintah membangun daerah wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pemerintah juga memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi dalam artian yaitu membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan daerah wisata dengan meningkatnya perekonomian yang pesat. Pemerintah telah beberapa kali menyampaikan informasi terkait program pembangunan daerah wisata mulai dari perencanaan sampai dengan pasca pembangunan sehingga masyarakat dapat memahami rencana untuk menjalankan proyek pembangunan desa wisata ini(Helwig, Hong, and Hsiao-wecksler n.d.)



Sumber : fieldwork

Dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020 tercatat 92 tempat obyek wisata yang terdiri dari 30 wisata buatan, 18 wisata budaya, 84 wisata alam, 20 wisata religi dan 28 wisata minat khusus. Dengan adanya kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Magelang mendorong akan laju pertumbuhan ekonomi dari berbagai kegiatan. Selain itu, kemajuan daerah wisata ini berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

### **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Candi Borobudur yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur

dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan pemerintah daerah kabupaten Magelang yang ikut andil dalam mengelola Candi Borobudur ialah Balai Konservasi Borobudur zona 3 sampai 5 .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik subjektif, berinteraksi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, menggunakan bahasa informal, berproses secara dinamis dan induktif(Hanggraito et al. 2021). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber berita dan jurnal yang menjadi acuan bagi peneliti dalam mengolah data peneliti menggunakan Nvivo. Peneliti mengumpulkan sekitar 25 jurnal, 2 berita dari Detik,3 berita dari Nasional Tempo,4 berita dari kompas, 1 berita dari Tribun News. Penelitian ini lebih ditekankan pada data. Terdapat dua data,yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari jurnal dan di elaborasi menggunakan teori Harold D. Laswell yang mempunyai 4 indikator yaitu komunikasi,komunikator,efek,dan media. Serta data sekundernya berasal dari website yang diambil dari dinas terkait, serta berita online.

Sumber berita	Intensitas
Jurnal dari scholar	30 jurnal
Detik	10 berita
Nasional tempo	10 berita
Kompas	10 berita
Tribun News	10 berita

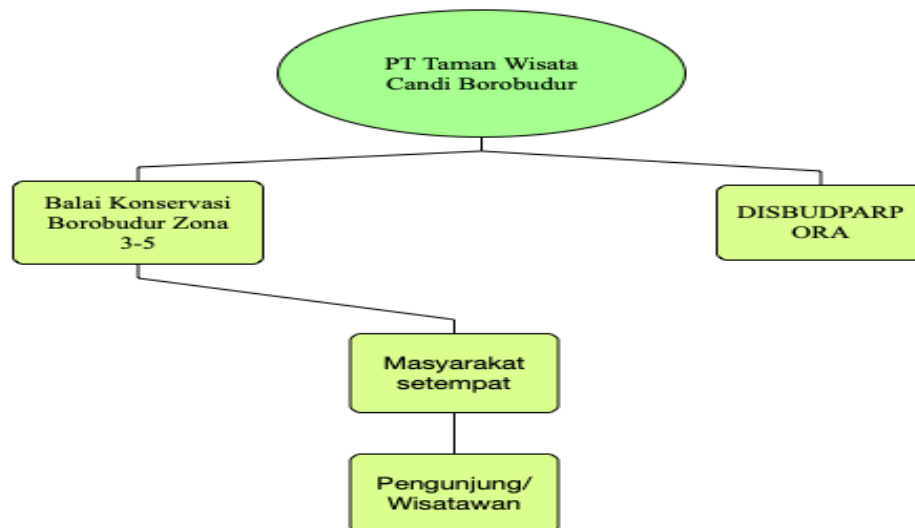
Dengan adanya teori Harold D. Laswell, kita dapat mengetahui Pemerintah daerah yaitu DISBUDPARPORA, Balai Konservasi Borobudur sebagai komunikator, masyarakat setempat sebagai komunikasi, dan media yang digunakan dalam strategi dalam pemasaran candi Borobudur untuk mendatangkan pengunjung atau wisatawan, serta efek atau timbal balik antar pengunjung dengan pemerintah Kabupaten Magelang dan masyarakat dalam memahami kebijakan dalam mengunjungi Candi Borobudur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun daerah sangatlah penting karena memiliki beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi  
Komunikasi membantu menyebarkan informasi tentang rencana pembangunan,kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat dan stakeholder ikut terlibat dan memahami tujuan serta merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat  
Dengan komunikasi yang efektif,pemerintah dapat mengundang partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan. Hal ini penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat dipastikan kebutuhan lokal akan dipahami dan dipertimbangkan dalam perencanaan.
- c. Transparansi dan akuntabilitas  
Komunikasi yang terbuka dapat membantu meningkatkan transparansi pemerintah dalam menggunakan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada publik.
- d. Pengelolaan konflik  
Dengan adanya komunikasi yang baik pemerintah dapat mengatasi konflik terkait dengan pembangunan.
- e. Membentuk citra yang positif  
Komunikasi yang efektif dapat membangun citra yang positif bagi pemerintah. Hal ini penting untuk mendapat dukungan dalam membangun daerah wisata (Salsabila et al. 2024).

Pola komunikasi pemerintah dalam membangun daerah wisata yaitu Candi Borobudur yang dibawah oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur dan pemerintah daerah kabupaten Magelang yang ikut andil dalam mengelola Candi Borobudur ialah Balai Konservasi Borobudur zona 3 sampai 5 . Yang dimana Balai Konservasi Borobudur zona 3-5 dan DISBUDPARPORA sebagai pemerintah daerah terkait dalam mengelola Candi Borobudur. Yang dimana Balai Konservasi Borobudur zona 3-5 dan DISBUDPARPORA sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sebagai komunikan. Yang dimana nanti memberikan efek atau timbal balik kepada pengunjung atau wisatawan.



Sumber : field work, nvivo 2024

Dari data diatas menunjukkan pola komunikasi pemerintah pusat yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu Balai Konservasi Borobudur zona 3-5 dan DISBUDPARPORA Kabupaten Magelang. Dan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat setempat yang nanti nya menjadikan pengunjung atau wisatawan memahami akan adanya kebijakan baru yang telah disampaikan.

Daerah wisata yang akan di bangun yang berada di kabupaten Magelang merupakan strategi dalam pembangunan destinasi pariwisata sebagai pilar daerah wisata nasional. Pemerintah juga menyampaikan secara langsung baik dari ide,program,dan gagasan pemerintah kepada masyarakat terutama masyarakat kabupaten Magelang (Simbolon and Khairifa 2018). Komunikasi tidak dapat terpisahkan oleh program atau kegiatan komunikasi maupun kegiatan pembangunan yang memerlukan dukungan komunikasi.perencanaan komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Magelang ini di dasari oleh latar belakang yang banyak dengan alam alam dan budaya nya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi daerah wisata(Dewi and Masri Hadiwijaya 2016).

Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi komunikasi, namun terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat proses pembangunan proyek daerah wisata yang berada di kabupaten Magelang (Buluamang and Handika 2018).

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Harold D Laswell yang memiliki empat indikator yaitu sebagai berikut :

1. Komunikator atau sumber  
Komunikator atau disebut sumber ialah pelaku yang bertindak memberikan berbagai macam informasi mengenai akan adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada candi Borobudur ialah Balai Konservasi Borobudur zona 3 sampai 5.
2. Komunikan atau khalayak

Komunikasikan atau khalayak yaitu yang menerima akan adanya berita yang disampaikan dari komunikator kepada masyarakat atau pengunjung wisatawan di Candi Borobudur.

3. Media

Media yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan melalui berita online, website dinas terkait, dan berbagai artikel

4. Efek atau timbal baliknya

Efek atau timbal balik ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan ialah komunikator mengharapkan komunikan untuk dapat mematuhi dan memahami apa yang disampaikan. Hal ini merupakan bentuk dari penanggulangan kerusakan yang terjadi di Candi Borobudur.

Maka dari itu, strategi komunikasi dapat di artikan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi dalam penyebaran pesan untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses pembangunan daerah wisata. Terdapat 4 strategi komunikasi yg di kemukakan oleh *Academy for Educational Development* ( AED) yaitu :

1. Strategi yang dasari pada media yang di pakai

Media komunikasi yg digunakan harusnya di sesuaikan sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

2. Strategi desain instruksional

Pemerintah harus fokus kepada masyarakat berfokus pada pendekatan kepada masyarakat sehingga lebih di terima.

3. Strategi partisipatori

Pentingnya Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak terjadi akan ketidakpahaman atau salah informasi

4. Strategi pemasaran

Strategi ini berfokus pada komunikasi yg terjadi pada penjual dan konsumen(Ramadhani and Prihantoro 2020).

Adapun faktor penghambat dalam komunikasi pemerintah dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah juga mengandalkan dana yang di dapat untuk pembangunan proyek daerah wisata ini dan pemerintah juga harus memasarkan daerah wisatanya agar kedepan ramai pengunjung baik wisatawan local maupun internasional. Dan pemasar juga memiliki keterbatasan dalam memasarkan daerah wisatanya karena harus memilih beberapa media yg harus di pasarkan. Berikut ini kendalanya :

1. Minimnya signal

Sinyal ini merupakan faktor utama untuk memasarkan daerah wisata ketika menggunakan media online. Apabila tidak ada sinyal maka komunikasi akan semakin terhambat.

2. Kurangnya SDM

Kurangnya SDM ini biasanya masyarakat akan merasa kesusahan dalam mempromosikan daerah wisatanya agar lebih banyak orang yang berkunjung tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan sebagai keterbatasan dalam mempromosikan daerahnya melalui berbagai media (Fransisca 2021)

Potensi wisata tidak akan pernah lepas dari peran pemerintah dalam ikut andil untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan daerah pariwisata ini dilakukan melalui regulasi dan perijinan. Permasalahan dalam perijinan adalah daerah wisata harus mempunyai rencana induk pembangunan kota pariwisata terutama yang ada di kabupaten Magelang. Pemerintah yang memegang kendali dalam urusan pariwisata ini adalah DISBUDPARPORA hal ini yang mengatur terkait organisasional maupun administratif yang selanjutnya akan di bagi ke dalam fungsi struktur, personil, dan kelayakan finansial. Dari 3 bagian tersebut merupakan syarat wajib yang harus di miliki untuk menjalankan program daerah wisata yang berada di Kabupaten Magelang (Rachmawati, Rachaju, and Alamianti 2019). Selain perijinan terdapat pula partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut andil dalam mengembangkan destinasi pariwisata

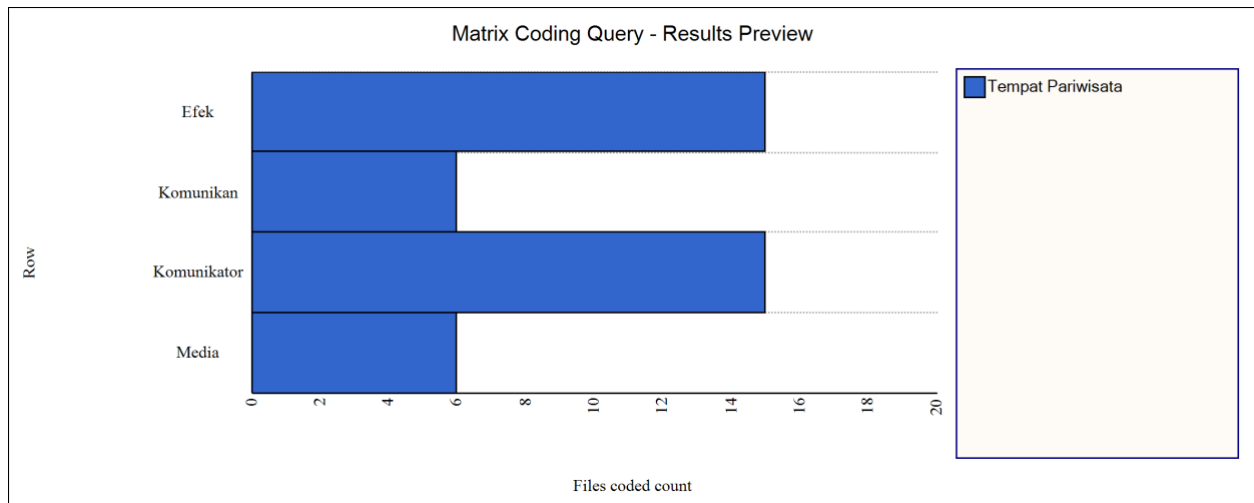
itu sendiri. Partisipasi selain masyarakat dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata adalah pemerintah, badan pengelola, para pemangku kepentingan. Berbagai hambatan di rasakan oleh masyarakat ketika akan berpartisipasi sampai ikut andil dalam menjalankan proyek wisata sendiri adalah kurangnya komitmen pemerintah dalam menjalankan program pembangunan ini. Meskipun pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat terutama yang berada di kabupaten Magelang yaitu lama lama fasilitas yang diberikan tidak berfungsi dengan baik seperti penerangan lampu. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang belum sadar terhadap keberadaan daerah wisata ini yaitu dengan sikapnya yang intoleran (Wiramatika, Sunarta, and Anom 2021).

Keberlanjutan pada dasarnya adalah suatu prinsip ataupun pandangan yang berorientasi ke masa depan. *Sustainability* adalah suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Apapun resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini jangan sampai diwariskan kepada generasi mendatang, sehingga benar-benar dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi masa mendatang Prinsip ini akan dapat terwujud dengan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan isu- isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Pada saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip pembangunan terbaik yang sering digunakan, salah satunya yaitu sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pembangunan yang harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan, artinya pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan ataupun diimplementasikan. Tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan ini adalah ingin mengetahui apakah pemerintah serius untuk mewujudkan rencana yang telah mereka buat. Harapan dari adanya implementasi kebijakan yaitu memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (Obot and Setyawan 2017).

Industri pariwisata kini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, selain industri minyak dan gas Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata (Fatmala and Yanyan Setiawan 2020). Selain itu, terdapat beberapa analisis yang peneliti akan tambahkan. Keberhasilan dari sector pemasaran pariwisata dapat dilihat dari obyek wisata yang akan di bangun ini selain memiliki *view* yang indah juga harus memiliki papan informasi, dengan papan informasi ini pengunjung yang akan datang dapat melihat beberapa informasi yang tersedia. Selain itu, ketika pembangunan wisata sudah terealisasikan pemerintah serta masyarakat ikut andil dalam pembuatan kegiatan guna untuk mengembangkan daerah pariwisatanya sendiri yaitu dengan mengadakan berbagai lomba yang di selenggarakan di dalam daerah wisata terutama di kabupaten Magelang. Hal ini masyarakat dapat mengetahui daerah wisata yang di kembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, sikap masyarakat juga berpengaruh maka dari itu masyarakat harusnya lebih ramah. Selain itu, tersedianya akses jalan yang baik untuk menuju ke daerah wisata dan juga memiliki lahan parkir yang cukup luas serta petugas keamanan yang dapat menjaga keamanan. Lokasi obyek wisata yang strategis tidak jauh dari pusat kota akan menjadi keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan dengan berbagai fasilitas penunjang (MPOC, Lia Dwi Jayanti, and Brier 2020).





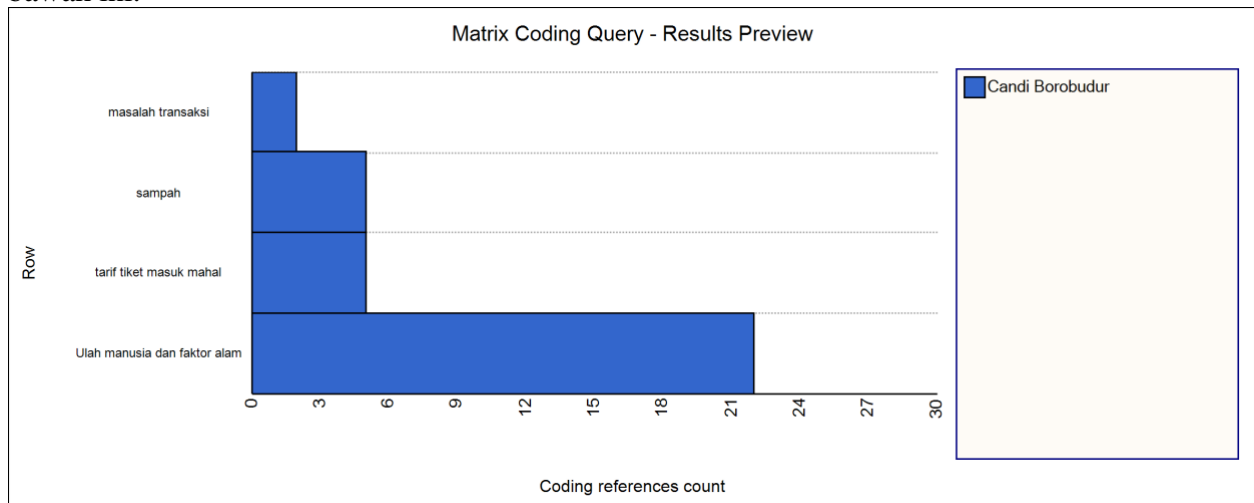


**Gambar 2. Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Wisata di Kabupaten Magelang**

(sumber : *fieldwork, nvivo 2024*)

Dari gambar 1 dan gambar 2 merupakan indikator yang sudah di olah. Dapat dilihat bahwa gambar 1, pada indikator efek memiliki nilai 17 dari 20. Nilai yang lebih besar dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Magelang. Berarti pengunjung atau wisatawan dapat memahami dengan adanya aturan- aturan yang berlaku. Sedangkan pemerintah sebagai komunikator memiliki nilai 15 dari 20 berarti pemerintah sudah gencar dalam membuat aturan-aturan untuk pengunjung agar lebih disiplin. Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa efek dan komunikator memiliki nilai yang sama yaitu 15 dari 20. Sedangkan media dan komunikasikan memiliki nilai yang sama yaitu 6 dari 20.

Dibawah ini terdapat parameter yang sudah di olah oleh peneliti, dapat dilihat di gambar bawah ini.



**Gambar 3. Olah data peneliti**

(Sumber : *fieldwork, nvivo 2024*)

Dari parameter tersebut dapat dilihat bahwa kerusakan candi Borobudur disebabkan oleh ulah manusia dan faktor alam yang paling besar. Selain itu masalah tarif tiket masuk yang semakin mahal memiliki nilai yang sama dengan permasalahan sampah. Dan sisanya permasalahan yang paling kecil ialah masalah transaksi yang eror. Kerusakan candi Borobudur disebabkan oleh ulah manusia seperti menempelkan permen karet, kencing sembarangan di stupa candi, dan faktor alam; hujan, erosi gunung merapi, tersambar petir sehingga mengakibatkan aus pada stupa candi.

Mengenai permasalahan candi Borobudur rusak akibat faktor dari alam maupun dari manusia maka perlu di lakukan pembuatan kebijakan atau *policy* dalam menangani masalah

tersebut. Yang pertama adalah membangun kembali atau rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak, menyusun rencana pembangunan kembali, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap wisatawan dan petugas agar tidak mengalami kerusakan kembali. Selain itu, menyediakan tempat sampah di berbagai sudut candi agar tidak membuang sampah secara sembarangan, petugas diharapkan keliling candi agar pengunjung tidak melakukan hal yang senonoh, dan yang paling penting melakukan edukasi terhadap pengunjung sehingga pengunjung sudah memahami dengan baik akan aturan yang sudah dibuat sehingga tidak terjadi kerusakan secara berulang-ulang (Kurniasari 2017).

Selain itu, manajemen pariwisata atau pengelolaan wisata candi Borobudur melakukan perlindungan fisik yaitu dengan melindungi candi dengan terpal sementara waktu hal ini bertujuan untuk melindungi stupa yang rentan akan kerusakan karena erosi ataupun abrasi. Dan melakukan restorasi agar tidak semakin rusak sehingga bangunan cagar budaya ini tetap terjaga dengan baik dan terawat dengan baik. Gambar dibawah ini merupakan dokumentasi ketika stupa atau batu-batu an candi di tutup oleh terpal agar kerusakan tidak semakin parah.(Handaru and Safariningsih 2023).



**Gambar 4. Candi Borobudur**

Sumber : Nasional Tempo

Menurut Tribunnews.com aksi vandalisme yang dilakukan di candi Borobudur sendiri mulai dari coretan hingga noda permen karet yang berada di stupa candi. Hal ini mengakibatkan merusak estetika candi. Aksi ini banyak ditemui oleh Balai Konservasi Borobudur atau BKB, maka dari itu BKB mengambil tindakan untuk membersihkan noda yang ada di stupa. Dengan pembersihan biasa atau disikat saja tidak bisa hilang maka terpaksa dilakukan dengan penyiraman cairan yang keras namun lama kelamaan akan merusak stupa itu sendiri. Maka dari itu, BKB mengambil langkah dengan menggunakan perangkat untuk dilakukan pengawasan terhadap kegiatan pengunjung agar tidak kecolongan lagi bilamana ada yang melakukan tindakan vandalisme maupun hal yg merugikan lainnya. Dibawah ini terdapat dokumentasi ditemukannya noda dan vandalisme oleh BKB.



Noda-noda permen karet yang tertempel di batuan candi di Candi Borobudur. Noda-noda tersebut terlihat di sekujur tubuh candi meninggalkan bekas putih yang susah hilang.

**Gambar 5. Dokumentasi Noda pada Candi**

Sumber : Tempo.com

Mengenai permasalahan harga tiket yang semakin mahal membuat pengunjung atau wisatawan tidak lagi tertarik berwisata ke candi Borobudur dikarenakan harga lonjakan tiket yang tak masuk akal. Mulai dari tiket masuk, paket sunrise, safari gajah, hingga tiket parkir kendaraan sudah sangat disayangkan karena harganya yang melonjak secara drastis. Hal ini mengakibatkan jumlah pengunjung ke Borobudur pada tahun 2020 hanya terdapat satu juta pengunjung tidak seperti tahun sebelumnya. Diharapkan untuk pengelolaan candi Borobudur lebih diperhatikan dalam menarik wisatawan salah satunya menurunkan harga tiket masuk. Hal ini perlu dalam mengembangkan perekonomian dengan memajukan pariwisata tetapi untuk tiket yang semakin mahal membuat perekonomian daerah tidak bisa berkembang dengan baik (Andina and Aliyah 2021).

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian serta mengembangkan objek wisata. Yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan daya tarik wisata adalah potensi yang mendorong pengunjung/wisatawan hadir di suatu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, perlunya sarana dan prasarana yang baik dan menunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, juga aksesibilitas yang memadai dan didukung dengan sumber daya yang menimbulkan rasa senang dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung.
2. Tata Laksana/Infrastruktur yang memadai Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawah tanah.
3. Pelayanan Masyarakat (Lingkungan) Dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata selalu ada campur tangan antara masyarakat, para pelaku usaha dan pemerintah guna untuk memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan (Kabupaten and Toraja 2023).

## KESIMPULAN

Dengan demikian , analisis yang di teliti oleh peneliti. Saran dari peneliti sendiri, upaya yang dilakukan untuk membangun daerah wisata ini tidaklah mudah karena terhambat oleh beberapa hal seperti perijinan, kurang nya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memasarkan daerah wisata dengan berbagai media, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (*miscommunication*). Upaya yang dilakukan pemerintah sendiri sudah melakukan komunikasi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di kabupaten Magelang. Pembangunan berkelanjutan yang berlatarbelakang pariwisata ini juga di sebut *Sustainable Tourism* yang berarti pemerintah akan menjalankan pembangunan berkelanjutan yang bedasarkan pariwisata guna untuk meningkatkan atau memperkenalkan daerah kepada khalayak umum atau pengunjung wisata. Kegiatan pembangunan proyek daerah wisata ini melibatkan masyarakat, pemerintah daerah mulai dari DISBUDPARPORA yang memegang kendali akan daerah wisata mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan administratif.

## REFERENSI

- Andina, Sabila Almas, and Istijabatul Aliyah. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur." *Jurnal Cakra Wisata* 22(3): 27–38.
- Buluamang, Yohanes Museng Ola, and Leope Pinnega Handika. 2018. "Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 21(1): 57–72. doi:10.20422/jpk.v21i1.481.
- Dewi, Mutia, and M. Masri Hadiwijaya. 2016. "Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang Dalam Kampanye Program Palembang Emas (Elok, Madani, Aman, Sejahtera)." *Jurnal Komunikasi* 10(2): 117–32. doi:10.20885/komunikasi.vol10.iss2.art2.

- Fadhal, Soraya. 2020. "Komunikasi Publik Di Tengah Krisis: Tinjauan Komunikasi Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Pandemi Covid-19." *Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19*: 1–25. <https://eprints.uai.ac.id/1469/>.
- Fatmala, Lia, and Asep Yanyan Setiawan. 2020. "Pengembangan Objek Wisata Sianyar Kamojang Di Kecamatan Ibum." *Geoarea: Jurnal Geografi* 3(1): 2685–7472. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/626>.
- Fransisca, Maria. 2021. "Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus Pada Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Signal* 9(1): 14. doi:10.33603/signal.v9i1.4248.
- Handaru, Agung Wahyu, and Ratna Tri Hari Safariningsih. 2023. *Eureka Media Aksara Manajemen Pariwisata Candi*. Eureka Media Aksara.
- Hanggraito, Ahmadintya Anggit, Ujang Sumarwan, Gunawan Iman, Tommy D. Andersson, Lena Mossberg, Anette Therkelsen, Suharsimi Arikunto, et al. 2021. "Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan." *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 1(1): 282. <http://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/prosiding/article/view/385%0Ahttp://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/index.php/JPI/article/view/134/80%0Ahttps://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en%0Ahttp://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidi>.
- Hapsari, Dian Octavia, and Sugi Rahayu. 2018. "Pengelolaan Balai Ekonomi Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kawasan Candi Borobudur." *Journal of Public Policy and Administration Research* 3(6): 828–42.
- Helwig, Nathaniel E, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler. "Memahami Strategi Komunikasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Di Era Digital."
- Hutabarat, Dollie Gustafia, and Achmad Edi Subiyanto. 2024. "Pengelolaan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah (Studi Hukum Kawasan Candi Borobudur Dan Prambanan)." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5(1): 1265–73.
- Istiyanto, S Bakti. 2011. "Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(1): 16–27. [www.pdfactory.com](http://www.pdfactory.com).
- Kabupaten, D I, and Tana Toraja. 2023. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Buntu Burake Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja." 23(7): 49–60.
- Kurniasari, Nani. 2017. "Strategi Penanganan Krisis Kepariwisata Dalam Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10(2): 177–89. doi:10.29313/mediator.v10i2.3007.
- MAHENDRA, ANINDHITA SATRIA. 2023. "Analisis Adopsi Teknologi Tanpa Uang Tunai Di Unit Prambanan PT Taman Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko (Persero)." (20312209).
- MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier. 2020. "Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Riam Kanan Di Kabupaten Banjar Analysis." *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21(1): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.
- Mustanir, A.; Ramadhan, Muhammad Rohady.; Razak, Muhammad Rais Rahmat; Lukman; Tajuddin, Sapri; Takrim. 2019. "Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ilmiah Clean Government* 2(2): 94–114.
- Nurul Khansa Fauziyah, and Aini Mahara. 2022. "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemasaran Kopi Gayo Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 3(2). doi:10.22515/ajdc.v3i2.5600.

- Obot, Filipus, and Dody Setyawan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan." *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6(3): 113. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id).
- Rachmawati, Emi, Rannie Dyah K Rachaju, and Dina Alamianti. 2019. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kampung Adat Cireundeu." *Dialektika* 6(2): 188–99. doi:10.32816/dialektika.v6i2.1267.
- Ramadhani, Rizky Wulan, and Edy - Prihantoro. 2020. "Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawacita Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18(02): 117–29. doi:10.46937/18202028913.
- Salsabila, Julia, Marcha Juliadrianti, Khairunnisa Luqyana, Hanif Al Kadri, and Merika Setiawati. 2024. "Urgensi Komunikasi Efektif Dalam Public Relations." *Jurnal Common* 7(2): 189–99. doi:10.34010/common.v7i2.11492.
- Simbolon, Besti Rohana, and Fenni Khairifa. 2018. "Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir." *Jurnal Darma aGUNG* 26(1): 606–19.
- Sulistyowati, Fadjarini. 2021. "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020." *Jurnal Riset Komunikasi* 4(2): 198–214. doi:10.38194/jurkom.v4i2.326.
- Syahputra, Ariat, and Yulia Sariwaty. 2021. "INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH SUNGAI CIDURIAN SELATAN KOTA BANDUNG Ariat Syaputra Yulia Sariwaty S." *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 8(2): 38–49.
- Wiramatika, I Gede, I Nyoman Sunarta, and I Putu Anom. 2021. "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Batur Di Kintamani Kabupaten Bangli." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 8: 107. doi:10.24843/jumpa.2021.v08.i01.p06.